

Otonomi Daerah dan Perekonomian Masyarakat Propinsi Banten

Oleh :

Dhona Shahreza

Dosen Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

d2reza@yahoo.com

Abstrak

Otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat adalah jika pembangunan di suatu wilayah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Indikator utama yang dikaji dalam paper ini adalah PDRB Propinsi Banten, Laju inflasi, perkembangan upah minimum dan perkembangan ketenaga kerjaan di Propinsi Banten. Hal tersebut merupakan indikator secara umum bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan pada propinsi Banten memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan metode deskriptif dan menggunakan data - data sekunder yang didapat dari instansi terkait, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran baik bagi pemerintah terkait, masyarakat umum maupun para akademisi tentang dampak pelaksanaan otonomi daerah terhadap perekonomian masyarakat khususnya di propinsi Banten.

Keyword : otonomi daerah, propinsi Banten, perekonomian masyarakat

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahteraan

masyarakat adalah jika pembangunan disuatu wilayah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat (Ramdhani, 2007). Masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah salah satunya adalah aspek ekonomi (Bapenas, 2008).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tulisan ini mencoba meringkas kondisi perekonomian di Provinsi Banten sebagai hasil capaian pembangunan selama menjadi provinsi yang secara otonomi terpisah dan mandiri. Seperti telah dituangkan pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten dengan pola skala prioritas. Pola ini diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi Banten. Untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan tentunya mengukur berbagai indikator pembangunan, yakni PDRB Propinsi Banten, Laju inflasi, perkembangan upah minimum dan perkembangan ketenaga kerjaan di Propinsi Banten.

GAMBARAN UMUM PROPINSI BANTEN

Melalui UU No. 23 Tahun 2000 tentang status karesidenan Banten Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Visi Banten adalah Rakyat Banten Sehat berlandaskan iman dan taqwa, yang berarti pada saat itu masyarakat Banten ada dalam kondisi sehat. Wilayah Provinsi Banten Memiliki Luas wilayah 8.800, 83 KM². Wilayah Provinsi Banten terletak pada batas astronomis 1050 1'11''-1060 7'12''BT dan 50 7'50''-70 1'1'' LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan internasional dan nasional.

Provinsi Banten berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Dan Jumlah kecamatan di Provinsi Banten berjumlah 161 dengan rincian yaitu Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, Kabupaten Tangerang terdiri dari 36 kecamatan, Kabupaten Serang terdiri dari 28 kecamatan, Kota Tangerang 13 kecamatan, Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan Kota Tangerang Selatan dari 7 kecamatan.

SEJARAH OTONOMI DAERAH PROPINSI BANTEN

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Propinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Propinsi Banten. Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. pada tanggal 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya Gubernur definitif. Adapun periode Gubernur Banten sejak berdirinya sampai sekarang adalah:

- Hakamudin Djamal sebagai Penjabat Gubernur Pertama (2000-2002)
- Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah (2002-2005)

- Ratu Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten (2005-2007)
- Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012)
- Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2017)

PEREKONOMIAN PROPINSI BANTEN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Banten pada triwulan IV-2011 tumbuh sebesar minus 0,08 persen (q to q), menurun bila dibandingkan dengan triwulan III-2011 yaitu sebesar 2,93 persen. Penurunan pertumbuhan ini lebih dipengaruhi oleh pengaruh musiman yaitu penurunan aktivitas sektor ekonomi yang selalu terjadi di triwulan IV setiap tahunnya, terutama pada aktivitas perdagangan luar negeri.

Pada triwulan IV, hampir semua sektor (kecuali sektor pertanian dan industri pengolahan) tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu sebesar 3,36 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,86 persen, sektor bangunan sebesar 2,43 persen, sektor jasa - jasa sebesar 1,57 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,47 persen. Sementara sektor lainnya tumbuh sebesar 1,41 persen, yakni sektor pertambangan dan penggalan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten, atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	5.242.350,48	5.408.861,73	5.641.900,50	5.974.381,61	6.921.460
Penggalan	69.292,77	79.151,12	90.195,51	97.765,08	101.500
Industri	31.496.751,75	32.225.075,20	32.707.531,26	33.779.343,16	47.034.180
Pegolahan Listrik, Gas dan Air Bersih	2.629.581,32	2.805.792,50	2.922.549,08	3.280.340,37	3.442.170
Konstruksi	1.880.273,94	2.010.388,56	2.204.523,41	2.359.793,17	2.590.500
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.800.800,86	14.202.996,50	15.127.918,26	16.276.822,36	18.055.710
Transportasi dan Komunikasi	5.780.569,93	6.200.675,31	6.877.187,61	7.719.131,44	8.510.770
Keuangan, Persewaan & Jasa	2.138.061,77	2.489.875,78	2.822.560,19	3.014.016,23	3.465.680

Sumber : BKPN Propinsn Banten, 2012

Inflasi

Hal lain yang menjadi indikatot dalam keberhasilan sebuah wilayah dalam meningkatkan perekonomian masyarakatdan wilayahnya adalah laju inflasi. Berikut adalah laju inflasi pada Propinsi Banten pada tahun 2006 hingga 2010.

Tabel 2. Laju Inflasi Pertumbuhan Inflasi Provinsi Banten

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Laju Inflasi	5.57	6.04	22.53	4.69	5.59

Sumber : BKPN Propinsn Banten, 2012 (diolah)

Dengan demikian terlihat bahwa sejak 2006 – 2010 rata - rata 0,2 persen serta dibandingkan periode tahun lalu maka tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.

Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah Bulanan terendah yang terdiri dari Upah pokok dan Tunjangan Tetap. Upah minimum Propinsi mengalami progres dari tahun ketahun walaupun tidak terlalu signifikan. Upah mimimum mencerminkan seberapa besar kaum buruh atau pekerja dapat memeuhi kebutuhannya dan disisi lain upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, pengusaha dan buruh/ pekerja. Berikut adalah Perkembangan Upah minimum Propinsi Banten selama 5 Tahun Terakhir

Tabel 3 Upah Minimum Provinsi Banten

No	Tahun	Upah Minimum Regional Propinsi Banten
1	2008	837.000
2	2009	917.500
3	2010	1.130.000
4	2011	1.250.000
5	2012	1.381.000

Sumber : BKPN Propinsn Banten, 2012.

Perkemangan Ketenagakerjaan di Propinsi Banten.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No.54/11/36/Th.VII, 6 November 2013, perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada Agustus 2013

dibandingkan Agustus 2012 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang dibanding Agustus 2012, yaitu sebesar 4.605,8 ribu orang.

Pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013, jumlah penganggur mengalami penurunan dari 519,2 ribu orang menjadi 509,3 ribu orang atau turun sekitar 9,9 ribu orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin. Sementara itu, selama periode satu tahun terakhir (Agustus 2012 – Agustus 2013), terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif kecil sebesar 1,5 poin.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Adapun penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk mereka yang bekerja pada kegiatan informal. Berdasarkan klasifikasi sederhana itu, maka pada Agustus 2013 sekitar 2.799,0 ribu orang (60,4 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 1.838,0 ribu orang (39,6 persen) bekerja pada kegiatan informal. Kondisi selama Agustus 2012 - Agustus 2013, penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah sekitar 11,3 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan bertambah sebesar 92,8 ribu orang.

Peningkatan ini menyebabkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal bertambah sebesar 104,1 ribu orang dan persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal naik dari 58,5 persen pada Agustus 2012 menjadi 60,4 persen pada Agustus 2013.

Sementara itu penduduk bekerja pada kegiatan informal selama periode satu tahun terakhir berkurang sekitar 72,9 ribu orang atau menurun dari 41,5 persen pada Agustus 2012 menjadi 39,6 persen pada Agustus 2013. Penurunan ini berasal dari kategori berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

PENUTUP

Secara keseluruhan laju pertumbuhan rata-rata sektor perekonomian di Propinsi Banten mengalami peningkatan pada periode setelah otonomi daerah. Secara umum otonomi daerah berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Propinsi Banten, walaupun tidak mengalami perubahan angka yang sangat signifikan baik pada PDRB, tingkat inflasi maupun keadaan ketenagakerjaan.

Perkembangan otonomi daerah tidak dapat serta merta dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di suatu wilayah, karena banyak aspek lain seperti keadaan politik ataupun ketersediaan kelembagaan yang memadai untuk mendukung peningkatkan perekonomian masyarakat disuatu wilayah. Sehingga dengan demikian dibutuhkan sebuah keterkaitan dan sinergian semua aspek dapat memperbaiki perekonomian masyarakat di sebuah wilayah sebagai konsekuensi dari penetapan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. STIE. Yayasan Keluarga Pahlawan, Yogyakarta.
- Aser, F. 2005. Tujuan Otonomi Daerah Dalam UU No. 32 Tahun 2004". Jurnal Otonomi Daerah. 1 : 45-48.
- Bappenas, 2008, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 – 2007, RIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance), Indonesia.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No.54/11/36/Th.VII, 6 November 2013.
- Rhamdani, Rizal, 2007, Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Sukabumi, Skripsi, IPB, Bogor
- [www. BKPNPropinsiBanten.go.id](http://www.BKPNPropinsiBanten.go.id)
- www.pemdabanten.go.id